



WAKIL BUPATI SUMBAWA

**JAWABAN BUPATI SUMBAWA
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN SUMBAWA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Disampaikan pada:
Sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sumbawa
Kamis, 21 September 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

**JAWABAN BUPATI SUMBAWA
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN SUMBAWA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT,

- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
- ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR,
- SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, DAN PIMPINAN OPD BESERTA PARA CAMAT SE-KABUPATEN SUMBAWA,
- PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN BUMN/BUMD, PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA,
- PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDEKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KITA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA CURAHKAN

KEHADIRAT JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG MEMBERIKAN SURI TAULADAN BAGI SELURUH UMAT MANUSIA.

ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH, KAMI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS PANDANGAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA SEBELUMNYA.

SELANJUTNYA SAYA AKAN MENYAMPAIKAN JAWABAN SECARA BERURUTAN SESUAI DENGAN URUTAN PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PADA SIDANG PARIPURNA KEDUA.

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA
JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN**

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI PDI PERJUANGAN, ATAS APRESIASI DAN USUL SARAN TERHADAP CAPAIAN PAD PADA TAHUN ANGGARAN 2023 INI, SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD), PER 1 JANUARI 2024 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUDAH HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG HKPD, DIMANA KOMPONEN PAJAK DAN KOMPONEN RETRIBUSI MENGALAMI PENYEDERHANAAN DARI SISI JUMLAH MAUPUN TARIFNYA. PENYEDERHANAAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN PEMERINTAH DAERAH KEHILANGAN POTENSI PAD PADA JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI TERTENTU, SEPERTI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. NAMUN PEMERINTAH PUSAT DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG HKPD MENYATAKAN BAHWA PENYEDERHANAAN TERSEBUT MENCIPTAKAN POTENSI PENINGKATAN PAD YANG CUKUP TINGGI BAGI DAERAH. SAAT INI PEMERINTAH DAERAH SUDAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PDRD KEPADA KEMENDAGRI DAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK DIEVALUASI, HARAPANNYA RANCANGAN PERDA TERSEBUT DAPAT DITETAPKAN SESUAI BATAS WAKTU YANG DIAMANKAN OLEH UNDANG-UNDANG HKPD. JAWABAN

INI SEKALIGUS MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, FRAKSI PKS, FRAKSI PPP DAN FRAKSI HANURA BERSATU.

PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELAH DIUPAYAKAN MELALUI PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2024 SEBESAR 25,5 MILYAR. PEMERINTAH DAERAH JUGA MENGUSULKAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH. SAAT INI, PENGUSULAN DAK FISIK SUDAH MENCAPAI TAHAPAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. ADAPUN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LAINNYA SEPERTI JALAN, JEMBATAN, DERMAGA JUGA TELAH DILAKUKAN UPAYA-UPAYA PENGUSULAN BAIK MELALUI DAK FISIK, INPRES JALAN DAERAH, MAUPUN DENGAN MEMANFAATKAN DIREKTIF MENTERI.

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN
INDONESIA RAYA**

TERKAIT PROGRES PENANGANAN DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN BLUD RSUD SUMBAWA, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PERMASALAHAN SAAT INI SELAIN BEBAN HUTANG, JUGA TERKAIT DENGAN BIAYA OPERASIONAL YANG CUKUP BESAR SEMENTARA DISISI LAIN PENDAPATAN OPERASIONAL BELUM MAMPU MENUTUPI KEBUTUHAN OPERASIONAL. OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH TELAH BERUPAYA MENGALOKASIKAN ANGGARAN DILUAR PENDAPATAN BLUD UNTUK MENJAMIN AGAR PELAYANAN RSUD DAPAT BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA. DISAMPING ITU, PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN ADVOKASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI PARTAI GERINDA ATAS PANDANGANNYA TERKAIT NOTA KEUANGAN RPAPBD 2023. SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PARTAI GERINDRA BAHWA KETERBATASAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH MENJADI SALAH SATU KENDALA DALAM OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN. HAL INI JUGA DIALAMI OLEH HAMPIR SELURUH DAERAH BAIK PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA DI SELURUH INDONESIA, TERUTAMA PASCA PANDEMI

COVID-19. KITA BERHARAP BAHWA TAHUN-TAHUN MENDATANG KONDISI INI BISA LEBIH BAIK SEIRING DENGAN PERBAIKAN PEREKONOMIAN NEGARA KITA.

SESUAI DENGAN PRAKIRAAN CUACA YANG DIKELUARKAN OLEH BMKG, BAHWA FENOMENA EL NINO INI AKAN BERLANGSUNG SAMPAI 3 BULAN KEDEPAN, SEHINGGA BERPOTENSI MENGALAMI KEKURANGAN AIR BERSIH. UNTUK JANGKA PENDEK, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENYALURKAN BANTUAN AIR BERSIH DI DESA-DESA YANG MENGALAMI KEKERINGAN MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA. PEMERINTAH DAERAH MELALUI BPBD, JUGA SEDANG BERKOORDINASI DENGAN BNPB UNTUK MEMBANTU PENGALOKASIAN ANGGARAN AIR BERSIH MELALUI DANA APBD PROVINSI NTB. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS, FRAKSI PPP, DAN FRAKSI PAN.

TERHADAP HARAPAN UNTUK PENANGANAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM KOTA YANG SUDAH MENGALAMI KERUSAKAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN UNTUK PENANGANANNYA. UNTUK RUAS JALAN SULTAN KAHARUDDIN YANG MERUPAKAN RUAS JALAN PROVINSI PEMERINTAH DAERAH TELAH BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK PENANGANANNYA.

MENGENAI SINYALEMEN MUDAHNYA PENERBITAN IMB YANG MENGAKIBATKAN MENINGKATNYA ALIH FUNGSI LAHAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TIDAK SERTA MERTA MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) SESUAI USULAN DARI MASYARAKAT. ADA PROSES YANG HARUS DILALUI DENGAN TETAP MENCERMATI KESESUAIAN PERUNTUKAN PEMANFAATAAN RUANG YANG SUDAH TERTUANG DALAM DOKUMEN RTRW DAN RDTR. DI DALAM DOKUMEN RDTR YANG MENGATUR TATA RUANG WILAYAH PERKOTAAN SUMBAWA BESAR, ALIH FUNGSI LAHAN DIPERKENANKAN DENGAN MENGACU KEPADA KRITERIA ITBX, DIMANA PERUNTUKAN RUANG DI WILAYAH PERKOTAAN SUMBAWA BESAR DAPAT DIBERIKAN KRITERIA PERUNTUKANNYA SESUAI, PEMANFAATANNYA TERBATAS UNTUK FUNGSI TERTENTU, DIBERIKAN JIKA SYARATNYA DIPENUHI, DAN BAHKAN TIDAK BERIKAN IZIN JIKA PERUNTUKANNYA TIDAK SESUAI. UNTUK WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA DI LUAR WILAYAH RDTR, PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) YANG BERIMPLIKASI PADA ALIH FUNGSI LAHAN DIBAHAS DI DALAM FORUM

PENATAAN RUANG SESUAI KRITERIA ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN RTRW.

TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET, AKAN MENJADI CATATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH MELALUI SATPOL PP DAN OPD TEKNIS UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN AGAR TIDAK MEMBAWA DAMPAK NEGATIF DIKEMUDIAN HARI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA

JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

MENANGGAPI PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT PENCAPAIAN REALISASI PAD TAHUN 2023, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOMITMEN AGAR CAPAIAN REALISASI PAD DAPAT TEREALISASI SESUAI DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERKAIT SEJAUH MANA ANGGARAN BELANJA PADA PERUBAHAN APBD 2023 BERPIHAK PADA LAYANAN DASAR MASYARAKAT, DAPAT DIJELASKAN BAHWA APBD TAHUN ANGGARAN 2023 YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DAN TELAH DITETAPKAN SEJATINYA ADALAH IKHTIAR KITA BERSAMA BAIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN DAN PRIORITAS MAUPUN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD. ADAPUN RANCANGAN PAPBD 2023 YANG SAAT INI KITA BAHAS BAHWA LEBIH BERSIFAT PENYESUAIAN DALAM RANGKA MENJAMIN PROGRAM-PROGRAM PELAYANAN DASAR YANG KITA TETAPKAN DALAM APBD 2023 DAPAT BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN DAN ATENSI FRAKSI DEMOKRAT TERKAIT MASIH BANYAKNYA MASALAH PEMBANGUNAN YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN MENGIKAT DANA YANG TERSEDIA SERTA WAKTU YANG TERSISA. PENYESUAIAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN APBD TETAP MEMPERTIMBANGKAN KECUKUPAN WAKTU PENYELESAIAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2023.

TERHADAP SERAPAN ANGGARAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOMITMEN UNTUK MEREALISASIKAN, NAMUN TENTU DISESUAIKAN DENGAN JADWAL DAN KONDISI KAS YANG TERSEDIA.

TERKAIT HARAPAN UNTUK LEBIH MEMPERHATIKAN GURU/TENAGA PENDIDIK DAN MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL UNTUK TENAGA GURU DI PULAU MEDANG, DAPAT DIJELASKAN BAHWA UNTUK PEMBAYARAN HONORER DAERAH TERPENCIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/P/2023 TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN DAERAH KHUSUS BERDASARKAN KONDISI GEOGRAFIS, BAHWA KABUPATEN SUMBAWA MASUK DALAM KRITERIA YAITU 6 WILAYAH YAITU KECAMATAN BATU LANTEH (DESA TANGKAN KULIT, DESA BATU ROTOK, DASA BAO DESA, DESA TEPAL), KECAMATAN LABUHAN BADAS (DESA SABOTOK) DAN KECAMATAN ORONG TELU (DESA MUNGKIN). ADAPUN TERHADAP PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA HONORER DAERAH TERPENCIL PULAU MEDANG AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

MENGENAI PENANGANAN GENG MOTOR, DAPAT DIJELASKAN BAHWA DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA TERMASUK GENG MOTOR, PEMERINTAH DAERAH MELALUI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TELAH MENYIAPKAN POS PELAYANAN ADUAN MASYARAKAT 1X24 JAM, PATROLI RUTIN DAN PATROLI WILAYAH, SERTA OPERASI GABUNGAN BERSAMA TNI DAN POLRI DALAM PENANGANAN GANGGUANN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MENCIPTAKAN KONDUSIFITAS DAERAH. DISAMPING ITU DIBUTUHKAN PENGUATAN FUNGSI KELUARGA SEBAGAI UNIT TERKECIL DI DALAM MASYARAKAT UNTUK MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN SECARA MANDIRI DAN PARTISIPATIF.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA

JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

TERHADAP HARAPAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera agar pemerintah daerah terus melakukan optimalisasi terhadap semua potensi PAD, telah disampaikan pada jawaban atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

MENANGGAPI PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS agar mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, dapat dijelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu siklus dalam

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERUPAYA MAKSIMAL MELAKUKAN PENGAWASAN, BAIK PENGAWASAN INTERNAL MAUPUN MELALUI KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEMERIKSA EKSTERNAL.

SEJALAN DENGAN HARAPAN FRAKSI PKS, AGAR PENGALOKASIAN BELANJA PADA APBD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, DAPAT DI JELASKAN BAHWA SALAH SATU PRINSIP DALAM PENYUSUNAN APBD ADALAH EFEKTIF DAN EFISIEN.

PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH MENGANUT SISTEM *PERFORMANCE BUDGETING* DIMANA SETIAP SATUAN INPUT HARUS MENGHASILKAN OUTPUT TERTENTU. OLEH KARENA ITU, PENGALOKASIAN ANGGARAN DIYAKINI DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

ADAPUN MENGENAI KONDISI KEKERINGAN DAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI BEBERAPA WILAYAH, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.

TERKAIT PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN HAL YANG SECARA TERUS-MENERUS DILAKUKAN DENGAN CARA MEMPERSIAPKAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA. LANGKAH INI DIORIENTASIKAN SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI. OLEH SEBAB ITU, PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI PKS UNTUK TERUS MENERUS MEMBERIKAN PERHATIAN YANG PENUH DAN POLA KERJASAMA DENGAN SEMUA PIHAK DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DI KABUPATEN SUMBAWA.

TERHADAP PANDANGAN FRAKSI PKS TERKAIT PEMEKARAN DESA, PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT DAN BERKOMITMEN DALAM MENGAWAL PROSES PEMEKARAN DESA KARENA DENGAN TERJADINYA PEMEKARAN DESA, PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT AKAN SEMAKIN BAIK. DAPAT DIJELASKAN PULA BAHWA HASIL VERIFIKASI TERHADAP BEBERAPA DESA YANG TELAH MENGAJUKAN PEMEKARAN DESA BELUM DAPAT DITINDAK LANJUTI KARENA TERDAPAT PERSYARATAN YANG BELUM TERPENUHI. WALAUPUN SAAT INI TERDAPAT SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.1-1/8000/SJ TENTANG MORATORIUM PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, KELURAHAN DAN DESA TERKAIT ADANYA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, SAMBIL MENUNGGU

SURAT EDARAN TERSEBUT DICABUT, PROSES-PROSES DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN YANG DISYARATKAN UNTUK PEMEKARAN DESA TETAP BERJALAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA

JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

TERHADAP PENGURANGAN TARGET PAD, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENGURANGAN TERSEBUT MERUPAKAN AKUMULASI DARI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BEBERAPA KOMPONEN PAD. PENGURANGAN TERJADI PADA PENDAPATAN BLUD RSUD SEBESAR RP 40 MILYAR, SEDANGKAN PADA KOMPONEN PAD LAINNYA RELATIF MENGALAMI PENAMBAHAN SEPERTI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS, PENDAPATAN PAJAK DAERAH, PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN. ADAPUN TERKAIT OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN DARI BPK RI AKAN MENJADI CAMBUK BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK BEKERJA LEBIH KERAS DAN LEBIH BAIK SEHINGGA OPINI WTP DAPAT KITA RAIH KEMBALI DI MASA YANG AKAN DATANG.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA

JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN ATAS APRESIASI FRAKSI PARTAI GOLKAR ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH. TERHADAP KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH YANG BERKURANG, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERUPAYA MAKSIMAL AGAR BISA MENINGKAT PADA TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA
JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA JAWABAN SEBELUMNYA BAHWA BAHWA PENURUNAN TERSEBUT TERJADI PADA PENDAPATAN BLUD RSUD. ADAPUN PADA KONTRIBUSI BUMD JUSTRU MENGALAMI PENINGKATAN SEBESAR RP 2,48 MILYAR. ADAPUN MENGENAI SUNTIKAN DANA KEPADA BUMD, SAAT INI PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL SEDANG DALAM TAHAPAN HARMONISASI DI KANWIL KEMENKUMHAM. DIHARAPKAN PERDA DIMAKSUD DAPAT MENJADI LANDASAN KITA UNTUK MENGOPTIMALKAN DUKUNGAN MODAL KEPADA BUMD-BUMD KITA.

TERHADAP PENANGANAN DAMPAK BANJIR DESA LITO, BATU TERING, SEMAMUNG, LENANGGUAR, PUNGKIT DAN LUNYUK, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH SEDANG BERKOORDINASI DENGAN BPBD PROVINSI NTB DAN BNPB MELALUI PROGRAM E-PROPOSAL JITUPASNA (PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA) BNPB RI. UNTUK TANGGUL PENGAMAN DUSUN BAGE LOKA DESA LITO, DESA LENANGGUAR DAN DESA LAWIN, AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH. SEDANGKAN AKSES JALAN LINTAS LUNYUK AKAN DITANGGULANGI MELALUI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR RI.

HARAPAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK TERCIPTANYA *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* SEJALAN DENGAN HARAPAN PEMERINTAH DAERAH. *GOOD GOVERNANCE* MERUPAKAN TUJUAN DARI REFORMASI BIROKRASI YANG MENJADI SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH. ADAPUN INDIKATOR DARI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI DITUNJUKKAN DENGAN NILAI SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH) DAN INDEKS RB (REFORMASI BIROKRASI) YANG DIBERIKAN ATAS PENILAIAN KEMENTERIAN PAN-RB. SAAT INI CAPAIAN NILAI SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA ADALAH 'B' (BAIK) DAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI DENGAN NILAI 'CC' (CUKUP BAIK).

TERKAIT HARAPAN FRAKSI PKB UNTUK PEMBENAHAN DTKS, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SAAT INI PEMERINTAH MELALUI BPS TELAH MELAKUKAN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) DALAM RANGKA PEMBENAHAN DATA ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH YANG

SELAMA INI SERING TUMPANG TINDIH. HARAPANNYA DATA REGSOSEK TERSEBUT AKAN MENJADI DATA TUNGGAL BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK DIMANFAATKAN SEBAGAI BASIS DATA PENSASARAN PROGRAM/KEGIATAN, TERMASUK UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA. INFORMASI TERKINI TERKAIT REGSOSEK, DATA TERSEBUT SEDANG DIFINALISASI OLEH BAPPENAS DAN BPS UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBELUM TAHUN 2024.

PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SANGAT MENDUKUNG DAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ATAS ATENSINYA TERHADAP PEGAWAI HONORER ATAU NON ASN. SEBAGAI BENTUK KEPEDULIAN DAN PERHATIAN TERHADAP SELURUH TENAGA HONORER ATAU NON ASN TERSEBUT, TELAH DIAJUKAN USUL FORMASI P3K KEPADA KEMENPAN-RB SEJUMLAH 1.028 FORMASI DAN YANG DISETUJUI ADALAH SEJUMLAH 996 FORMASI. SELAIN USULAN FORMASI TAHUN 2023, PADA TAHUN 2022 KAMI JUGA TELAH MENGAJUKAN USULAN FORMASI KEPADA KEMENPAN-RB SEJUMLAH 1.585 FORMASI DAN YANG DISETUJUI SEJUMLAH 1.585 FORMASI.

MENANGGAPI PANDANGAN FRAKSI PKB BERKAITAN DENGAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMILIKI MASTER PLAN DRAINASE PERKOTAAN. DALAM TAHUN INI AKAN DILAKUKAN NORMALISASI SALURAN JALAN, DAN MELAKUKAN PEMELIHARAAN RUTIN TERHADAP RUAS-RUAS JALAN DIMAKSUD SERTA MENGAJAK MASYARAKAT SADAR AKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
AMANAT NASIONAL**

BERKENAAN DENGAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI SETIAP KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH SUDAH DISAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERHADAP PENEMPATAN PEGAWAI, PEMERINTAH DAERAH SANGAT SERIUS MELAKSANAKAN PEMBENAHAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN ASN, TERMASUK MENGUPAYAKAN AGAR PENEMPATAN PNS SESUAI DENGAN

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI. HAL INI TERTUANG DALAM PERATURAN KEMENTERIAN PAN-RB NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA. SELAIN ITU JUGA, DALAM RANGKA PENATAAN POLA KARIER (MUTASI DAN PROMOSI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA, TELAH DITETAPKAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA SEHINGGA DAPAT MENJADI PEDOMAN DALAM MEMPERKUAT DAN MENGAKSELARASI PENERAPAN SISTEM MERIT DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN DIPEROLEHNYA PENGHARGAAN MERITOKRASI DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) ATAS KEBERHASILAN KABUPATEN SUMBAWA MENERAPKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN PREDIKAT BAIK. SELAIN ITU JUGA DI TAHUN INI KABUPATEN SUMBAWA MEMPEROLEH PENGHARGAAN BKN AWARD 2023 DARI BKN DENGAN KATEGORI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINILAI TELAH BERHASIL MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASN DAN PEMANFAATAN LAYANAN DIGITAL ASN.

TERKAIT PENERTIBAN PARKIR DI SEPANJANG JALAN PROTOKOL DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MENETAPKAN TITIK-TITIK PARKIR DI SEPANJANG JALAN PROTOKOL (PARKIR TEPI JALAN) DAN SELALU DILAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP JURU PARKIR DI SETIAP TITIK TERSEBUT. UNTUK JURU PARKIR RESMI TELAH DILENGKAPI ATRIBUT BERUPA ROMPI DAN PAKAIAN LENGAN PANJANG SERTA TANDA PENGENAL. KE DEPANNYA DIUPAYAKAN PENGGUNAAN SISTEM QRIS DALAM PEMBAYARAN PARKIR.

TERHADAP HARAPAN AGAR BERSIAP SIAGA DALAM MENGATASI SITUASI KEKERINGAN, TERUTAMA SELAMA MUSIM TANAM, DAPAT DIJELASKAN BAHWA EL-NINO YANG TERJADI DI KABUPATEN SUMBAWA TIDAK BERDAMPAK SIGNIFIKAN. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI ANGKA TANAM PADI DAN PALAWIJA SAAT INI TETAP MENINGKAT TERMASUK PRODUKSI PERTANIAN KITA MEMGALAMI SURPLUS. ADAPUN KEKERINGAN YANG TERJADI, HAL ITU DISEBABKAN OLEH ADANYA PELANGGARAN POLA TANAM. PEMERINTAH TELAH MENGANTISIPASI MASALAH KEKERINGAN MELALUI GERAKAN

MASYARAKAT (GERMAS) DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN BIBIT PADI DAN PALAWIJA, PUPUK CAIR, PUPUK ORGANIK PADAT DAN PESTISIDA NABATI DI LOKASI-LOKASI YANG MENGALAMI KEKERINGAN SERTA PEMBERIAN BANTUAN BIBIT PADI, JAGUNG DAN TANAMAN HORTIKULTURA UNTUK DITANAM PADA SAAT MUSIM KEMARAU MAUPUN MUSIM HUJAN. SEDANGKAN PEMERINTAH DAERAH BERUPAYA MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN BERUPA MESIN AIR MILIK BRIGADE YANG KITA MILIKI UNTUK DIPERPINJAMKAN KEPADA PETANI YANG TANAMANNYA MENGALAMI KEKERINGAN DENGAN SISTEM PINJAM PAKAI. DAN PENGALOKASIAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRA PANEN MAUPUN PASCA PANEN. SELAIN ITU JUGA DISIAPKAN BANTUAN PANGAN BERUPA BERAS YANG BERASAL DARI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA APABILA TERJADI DAMPAK DARI FENOMENA EL NINO.

BERKENAAN DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA, PEMERINTAH DAERAH SENANTIASA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN BNN SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMPUNYAI OTORITAS DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERUTAMA DALAM MENSOSIALISASIKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN).

TERKAIT PENANGANAN KENAKALAN REMAJA TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

ADAPUN MENGENAI PEMBANGUNAN RSUD SERING TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN. PEMERINTAH DAERAH MELALUI TIM TERPADU TERUS DAN SENANTIASA MEMANTAU PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG, DAN TERUS BERKOORDINASI DENGAN PERTAMINA SELAKU BADAN USAHA YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG UNTUK MEMPERHATIKAN SEBARAN DISTRIBUSI DI WILAYAH-WILAYAH TERTENTU. BEBERAPA SUB PENYALUR/PANGKALAN YANG BERMAIN ATAU MENJUAL TIDAK SESUAI KETENTUAN TELAH DIBERIKAN TEGURAN DAN DITINDAK MELALUI PEMUTUSAN KERJASAMA ATAU PENGURANGAN KUOTA PENJUALAN. KEBIJAKAN OPERASIONAL DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG ADALAH KEBIJAKAN NASIONAL, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH DALAM KAPASITAS PENGAWASAN TERUS BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH MELALUI

KEMENTERIAN ESDM TENTANG PENAMBAHAN KUOTA DENGAN MEMPERHATIKAN JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN PERKEMBANGAN UMKM YANG TERUS MENINGKAT.

UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TETAP MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH DAN TERKAIT JEMBATAN AI NGELAR PADA TAHUN INI DILAKUKAN REHABILITASI.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN AGAR MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA YANG CUKUP UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA), DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOMITMEN UNTUK MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA TERHADAP SEMUA BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH, NAMUN TETAP DISESUAIKAN DENGAN PRIORITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. TAHUN 2023, BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN PPA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIALOKASIKAN MELALUI BELANJA OPERASIONAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBESAR RP.683 JUTA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PENJELASAN MENGENAI PENGURANGAN PENDAPATAN DAERAH SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS.

MENANGGAPI PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP TERKAIT REALISASI APBD 2023, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SAMPAI DENGAN PER 30 AGUSTUS 2023, REALISASI BELANJA DAERAH MENCAPAI 51 PERSEN. PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOMITMEN BAHWA REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI DENGAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN RSUD, TETAP MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH. TERHADAP BEBERAPA KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN TETAP DIUPAYAKAN PEMENUHANNYA. SEDANGKAN MENGENAI KELANJUTAN PEMBANGUNAN RSUD DI JL. SULTAN KAHARUDDIN TETAP DILAKUKAN SECARA BERTAHAP.

MENGENAI HARAPAN AGAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK BANGUNAN SEKOLAH DAN MEUBELER KURANG LAYAK, DAPAT DIJELASKAN

BAHWA HAL INI TETAP DIUPAYAKAN SECARA TERUS MENERUS. TAHUN 2023 TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN TERHADAP KEBUTUHAN TERSEBUT. MELALUI KESEMPATAN INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PPP DAN SELURUH ANGGOTA DPRD ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP KOMITMEN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2023.

TERKAIT STABILISASI HARGA KOMODITI PERTANIAN, PEMERINTAH DAERAH TERUS MEMBERI PERHATIAN. SALAH SATUNYA MELALUI FASILITASI KEMUDAHAN DISTRIBUSI KOMODITI PERTANIAN KELUAR DAERAH DENGAN MEMANFAATKAN PROGRAM TOL LAUT. PROGRAM INI AKAN MEMANGKAS BIAYA DISTRIBUSI. FASILITASI PEMANFAATAN PROGRAM TOL LAUT TELAH MAMPU MENJAGA HARGA BELI DI PETANI DI ATAS HARGA BELI YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH. DEMIKIAN PULA DENGAN HARGA GABAH/BERAS, PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN BULOG UNTUK MENGOPTIMALKAN SERAPAN GABAH PETANI. ALHAMDULILLAH, PADA TAHUN INI PETANI DAPAT MENIKMATI HARGA YANG CUKUP MENGGEMBIRAKAN DI ATAS HARGA RATA-RATA PADA TAHUN SEBELUMNYA. MENYIKAPI MAHALNYA HARGA PUPUK DAN OBAT-OBATAN, TETAP DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA PARA PETANI, KELOMPOK TANI, GABUNGAN KELOMPOK TANI MAUPUN KELOMPOK WANITA TANI AGAR DAPAT MEMBUAT PUPUK ORGANIK DAN PESTISIDA NABATI DARI BAHAN-BAHAN ALAMI TANPA MENGELUARKAN BIAYA MAHAL.

TERKAIT HARAPAN UNTUK MEMANTAU PENDRIBUSTRIAN LPG 3 KG DI LAPANGAN, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP AGAR DAPAT MEMAKSIMALKAN PENDISTRIBUSIAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT YANG SANGAT MEMBUTUHKAN SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.

ADAPUN MENGENAI OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN POTENSIAL SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERHADAP PEMBANGUNAN EMBUNG OI PA'A AKAN DIKOORDINASIKAN DENGAN BWS NUSA TENGGARA I. UNTUK PEMBANGUNAN PARAVET (PENAHAN TEBING) SUNGAI DI LOKASI DESA JOTANG, EMPANG ATAS, EMPANG BAWA, BUNGA EJA KECAMATAN EMPANG DILAKUKAN NORMALISASI DI LOKASI REBAN PARIYA DI DESA EMPANG ATAS, TETAP MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

RUAS JALAN SJN-LAMENTA, SJN-BOAL, EMPANG-ONGKO JUGA RUAS JALAN EMPANG-BANDA KECAMATAN EMPANG, MERUPAKAN JALAN KABUPATEN YANG PENANGANANNYA SECARA KONTINYU MELALUI DAK FISIK BIDANG JALAN. SEDANGKAN UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TETAP MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

**SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA
SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
HATI NURANI RAKYAT BERSATU**

TERHADAP HARAPAN FRAKSI HANURA BERSATU UNTUK MEMAKSIMALKAN SELURUH POTENSI DAERAH YANG MENOPANG PENDAPATAN ASLI DAERAH, TETAP MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT DENGAN FRAKSI HANURA BERSATU UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN SELURUH BELANJA DAERAH TERMASUK BELANJA UNTUK Mendukung SINERGITAS DENGAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI. HAL INI DITUANGKAN DALAM PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS ATENSI FRAKSI HANURA BERSATU MENGENAI KASUS STUNTING/TENGKES. PEMERINTAH DAERAH TELAH BERUPAYA MELAKUKAN UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN TARGET NASIONAL PENURUNAN PREVALENSI STUNTING PADA TAHUN 2024 MENJADI 14 PERSEN. CAPAIAN PREVALENSI PENURUNAN STUNTING BERDASARKAN PENCATATAN ELEKTRONIK DAN PELAPORAN BERBASIS GIZI

MASYARAKAT (EPPGBM) TAHUN 2022 TELAH MENCAPAI 8,11 PERSEN. UPAYA YG TELAH DILAKUKAN SECARA KONVERGENSI OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI OPD DAN STAKEHOLDER TERKAIT TELAH BERUPAYA SECARA KOLABORATIF, MANDIRI DAN PARTISIPATIF MELAKSANAKAN BERBAGAI INTERVENSI SPESIFIK MAUPUN INTERVENSI SENSITIF MELALUI PROGRAM/KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

ADAPUN MENGENAI SARANA DAN PRASARANA JALAN KHUSUSNYA DI TURUNAN LINGKUNGAN RABERAS AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

TERKAIT PERCEPATAN REALISASI BANTUAN SOSIAL TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

DEMIKIAN PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA. MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, AGAR KITA SENANTIASA DIBERIKAN KEKUATAN DAN KESEHATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN KEPADA KITA BAGI KEMAJUAN DAERAH YANG KITA CINTAI INI.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SUMBAWA BESAR, 21 SEPTEMBER 2023

WAKIL BUPATI SUMBAWA

Hj. DEWI NOVIANY, S.Pd., M.Pd